

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Maritim, di mana pulau-pulau yang berada di dalamnya dipisahkan perairan yang membuat ragam bentang antarpulau. Hal tersebutlah yang menjadi hambatan, sebab peningkatan arus informasi dan teknologi tentunya membuat kebutuhan manusia semakin meningkat sehingga kebutuhan tersebut pun tidak bisa dipenuhi oleh setiap negara maupun daerah. Transportasi laut ialah transportasi yang dinilai paling efisien dan efektif untuk aktivitas perdagangan.

Pertumbuhan yang stabil seperti ini mendorong investasi pembangunan kapal baru, walaupun padat modal, untuk terus bertumbuh. Selain dalam pembangunan kapal baru, perawatan terhadap kapal-kapal yang sudah beroperasi perlu diperhatikan, dan negosiasi *export - import* juga perlu diperhatikan. Mulai dari perawatan kapal dan proses negosiasi yang sedang berlangsung harus jelas agar kinerja menjadi lebih efisien dan efektif. Dalam pelaksanaan perencanaan dan negosiasi ini pengadaan memiliki peran yang sangat penting.

Pesatnya perkembangan teknologi dan pengetahuan tentunya mempengaruhi kemajuan bisnis, baik secara individu maupun kelembagaan. Perkembangan media informasi tentunya juga memegang peran yang esensial pada sebuah usaha guna menghasilkan kemajuan yang diperuntukkan untuk kepentingan manusia pada seluruh bidang. Persediaan barang adalah barang maupun bahan yang disimpan guna pemenuhan kebutuhan tertentu, misalnya, barang yang berguna untuk aktivitas keseharian perkantoran maupun proses produksi. Selaras dengan itu, maka sisten informasi pengolahan data sangat esensial untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas pekerjaan (*Khowais & Alamsyah, 2022*).

Pengadaan barang/jasa tentunya sangat esensial pada sebuah perusahaan, sebab hal tersebut penting untuk bisa memperoleh pekerjaan, jasa, serta barang yang diperlukan perusahaan khususnya PT. PAL INDONESIA (PERSERO) (*Tupan & Suryanto, 2019*). PT. PAL INDONESIA ialah Perusahaan yang bergerak di Bidang

Galangan Kapal dimana aktivitas utamanya ialah menghasilkan kapal niaga dan perang, rekayasa umum melalui spesifikasi berdasarkan pemesanan, serta melayani jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal. Dalam membuat kapal, tentunya perusahaan memerlukan bahan baku yang didapatkan dari luar negeri secara impor sebab industri dalam negeri masih belum sesuai dengan standar produksi yang dimiliki oleh perusahaan.

Impor ialah Memasukkan barang dari luar negeri berdasarkan regulasi pemerikan pada peredaran masyarakat yang pembayarannya menggunakan *valas* (Amir MS, 2013). Penanganan dokumen impor membutuhkan relasi antara perusahaan *forwarder* dengan importir. Tentunya pihak yang terlibat dalam pengimporan barang, terlebih melalui transportasi laut antara lain ialah Bank Pelindo, Asuransi, *Shipper*, *Freight Forwarder/Customs Clearance*, Bea Cukai, dan *Consignee* dimana mereka berperan dan bertanggungjawab sesuai bidangnya masing-masing berdasarkan pola relasi yang dibutuhkan. Pejabat bea dan cukai berwenang untuk Melakukan penetapan dan penelitian mengenai tarif nilai pabean guna menghitung bea masuk. Importir hendaknya memberitahu terkait harga, jenis, dan jumlah barang dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Besaran pungutan negara sangatlah dependen terhadap besaran pabean yang diinformasikan importir, dimana tiap barang yang menjadi barang impor hendaknya melalui beberapa tahapan pemeriksaan berdasarkan penjaluran yang sudah disepakati oleh Dirjen Bea dan Cukai. Karena itulah, importir juga memiliki hambatan saat pergerakan barang tidak diiringi dengan pengurusan dokumen. Ketidklengkapan dokumen dapat menjadi kendala dalam proses pengeluaran barang. Karena itulah dibutuhkan pengendalian khusus terhadap dokumen yang diterima importir serta dibeirkan kewenangan untuk mengurusnya terhadap PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) yang menjadi bagian *forwarder*. Pemandahan penguasaan itu berguna untuk melakukan percepatan terhadap pengurusan barang yang ada pada daerah pabean serta untuk menghindari *cost* berlebih yang diakibatkan oleh lamanya pengurusan *Customs Clearance*. Adapun biaya itu meliputi biaya *demurrage* dan *storage* yang harus dibayarkan oleh importir di luar biaya pokok pembayaran atas

barang impor yang membuat penanganan khusus dibutuhkan pada suatu Proses Importasi.

Pengadaan Barang dan Jasa tentunya masih berkorelasi dengan Regulasi Pemerintah, Regulasi Direksi, dan juga Keberadaan Anggaran. Anggaran sangat esensial pada pengadaan jasa dan barang, sebab anggaran tersebut jugalah yang bisa menentukan jenis dari Pengadaan Barang dan Jasa (*Ardiani et al., 2017*). Pengadaan ialah aktivitas guna melakukan realisasi kebutuhan yang sudah direncanakan dan disetujui melalui pembelian secara langsung maupun *tender* dari distributor, produksi/pembuatan sediaan farmasi baik steril maupun non steril, maupun berasal dari sumbangan/ hibah (*Kandou et al., 2016*). Setiap entitas perusahaan mengupayakan keuntungan yang besar sebagai sumber pendanaan terbaik bagi kelangsungan hidup lembaga atau instansi tersebut. Tujuan lain, antara lain sebagai pengembangan, *prestige*, pelayanan, dan keberterimaan badan usaha dalam kehidupan masyarakat, harus dipenuhi agar perusahaan dapat bertahan. Akibatnya, eksekutif perusahaan akan berusaha untuk bertindak secara profesional setiap saat dan terus mengembangkan ide-ide baru untuk mencapai tujuan mereka. Dalam praktiknya, itu harus dibangun di atas konsep manajemen yang relevan secara global.

Pengadaan barang dan jasa atau tender sangat berkorelasi dengan fasilitas baru, misalnya alat tulis, rumah sakit, bangunan, perkantoran, maupun jalan yang diimplementasikan oleh lembaga pemerintah. Padahal hal ini tidak hanya terjadi di lembaga pemerintahan saja melainkan juga bisa dilakukan oleh perusahaan swasta maupun BUMN. Pada dasarnya, tender ada untuk memenuhi kebutuhan pemerintah maupun perusahaan terkait adanya jasa maupun barang yang bisa mendorong kinerja perusahaan (*Khowais & Alamsyah, 2022*).

Pengadaan barang/jasa ialah salah satu aktivitas yang esensial untuk mendorong kemajuan pembangunan nasional. Bila mana ditinjau dari banyak perspektif, maka tentunya kemajuan Indonesia sangat berkorelasi dengan kegiatan itu. Misalnya, pada bidang ekonomi, masa pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertumbuhan ekonomi bisa dilaksanakan melalui mekanisme *tender* yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya melalui Pembangunan Infrastruktur

Telekomunikasi, Jembatan, Jalan, dan lain sebagainya. Adapun bilamana di lihat dari bidang sosial, maka *tender* yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat berguna untuk menunjang Fasilitas Pendidikan, Kesehatan, Pengentasan Masalah Sosial, hingga Kemiskinan (*Febriawati & Fanida, 2016*).

Proses pengadaan jasa/barang tentunya menambahkan nilai pada instansi pemerintah yang berkorelasi dengan kepentingan peningkatan mutu layanan (*Sopian, 2012*). Karenanya, proses pengadaan jasa/barang yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya bisa dapat menunjang pelaksanaan *Good Governance* yang baik melalui pelaksanaan *tender* yang efisien dan efektif. Seluruh pengadaan jasa. Barang juga hendaknya bisa dikendalikan secara *internal* supaya ada Pengarahan, Pengawasan, serta Pengukuran Sumber Daya dan juga Pencegahan Penemuan Ketidaksesuaian Prosedur. Pengadaan berguna untuk bisa memperoleh suatu benda maupun barang. Karena itulah, setiap perusahaan (Pemerintah/Swasta) haruslah menerapkan prosedur maupun sistem pengimplementasian kerja supaya kegiatan operasionalnya dapat berjalan dengan lancar. Keberadaan prosedur dan sistem yang bagus tentunya dapat mewujudkan adanya pengendalian yang akan membuat tujuan perusahaan bisa tercapai secara optimal (*Majampoh et al., 2018*).

Pengadaan barang dan jasa memiliki prosedur dan sistem dalam pengimplementasian pengadaan. Sistem sendiri bisa diartikan sebagai sebuah prosedur yang disusun untuk mengimplementasikan fungsi dan tugas perusahaan. Sistem pada sebuah pengadaan jasa dan barang meliputi empat metode, yakni Metode Penunjukan Langsung, Pelelangan Umum, Pengadaan Langsung, serta Penunjukan Sederhana. Adapun Prosedur ialah Tahapan maupun langkah yang saling berkorelasi satu dengan yang lain. Prosedur Pengadaan Jasa dan Barang mempunyai beberapa tahapan yang berawal dari persiapan hingga penandatanganan kontrak/perjanjian.

Berdasarkan uraian tersebut, ditambah dengan harapan penulis untuk dapat mendalami ilmu terkait Prosedur dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa pada sebuah Perusahaan, pada akhirnya peneliti berniat untuk meneliti mengenai “Analisis Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di PT. PAL INDONESIA (Persero)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah disebutkan, maka rumusan masalah penelitian adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di PT. PAL INDONESIA (Persero) ?
2. Bagaimana hambatan dalam Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di PT. PAL INDONESIA (Persero) ?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang dikemukakan, penulis melakukan pembatasan pada permasalahan yang diteliti, yaitu menganalisa sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa di PT. PAL INDONESIA (Persero) meliputi pelaksanaan serta hambatan dalam Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di PT. PAL INDONESIA (Persero).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan menganalisis Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di PT. PAL INDONESIA (Persero).
2. Menjelaskan dan menganalisis hambatan dalam Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di PT. PAL INDONESIA (Persero).

1.5 Manfaat Penelitian

Berbagai pemangku kepentingan akan memperoleh pengetahuan yang ditemukan oleh penelitian tentang masalah ini, termasuk :

1. Manfaat Bagi STIAMAK Barunawati Surabaya
Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan, informasi, serta masukan bagi pembaca supaya pembaca mendapatkan tambahan informasi terkait Prosedur dan Sistem Pengadaan Jasa dan Barang. Tidak hanya itu, hasil

temuan penelitian ini juga diharapkan bisa menambah koleksi literatur yang terdapat di perpustakaan.

2. Manfaat Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa di PT. PAL INDONESIA (Persero).

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan atau bisa diteliti lebih lanjut, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian dengan tema yang relevan.